

## **Analisis Kebutuhan Peningkatan Literasi Kewarganegaraan Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di Kelas IV SDN Rato Lambu**

**Hermansyah\*, Afendi, Gufran, Agus Salam, Waliyudin**

Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia

\*Corresponding Author: [afendiwera@gmail.com](mailto:afendiwera@gmail.com)

### **Article History**

Received : June 27<sup>th</sup>, 2026

Revised : July 23<sup>th</sup>, 2026

Accepted : August 03<sup>th</sup>, 2026

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan peningkatan literasi kewarganegaraan siswa kelas IV SDN Rato Lambu pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Menggunakan pendekatan analisis kebutuhan (*need assessment*), data dikumpulkan melalui observasi proses pembelajaran dan tes diagnostik uraian terbuka pada 24 Februari 2026. Hasil penelitian mengungkap adanya krisis literasi kewarganegaraan, ditunjukkan oleh rendahnya rata-rata nilai tes siswa (54,20) dan persentase ketuntasan klasikal yang hanya mencapai 30%. Rendahnya capaian ini berakar dari proses pembelajaran yang kaku, tekstual, dan berpusat pada guru (*teacher-centered*). Sebagai solusi, direkomendasikan intervensi instruksional mendesak berupa penerapan model pembelajaran aktif, pemanfaatan media berbasis isu kontekstual, dan pembukaan ruang diskusi yang demokratis bagi peserta didik.

**Keywords:** Analisis Kebutuhan, Literasi Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Sekolah Dasar.

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar (SD) memiliki peranan yang sangat krusial dalam membentuk karakter dan pemahaman siswa sebagai warga negara Indonesia sejak dini. Mata pelajaran ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah transfer pengetahuan akademis (*civic knowledge*), tetapi juga sebagai sarana utama untuk menanamkan nilai-nilai dasar yang esensial bagi kehidupan bermasyarakat. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban, siswa diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri, serta mampu berkontribusi positif terhadap lingkungan sekitar (Pratama & Setiawan, 2022). Sebagai amanat dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembelajaran ini bertujuan menginternalisasi nilai-nilai luhur bangsa agar dapat dijadikan pedoman perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari (Nugroho, 2021). Oleh karena itu, penguatan kompetensi moral sejak usia sekolah dasar menjadi fondasi utama dalam menjaga integrasi dan jati diri generasi penerus bangsa (Putri & Wahyudi, 2023).

Lebih lanjut, tujuan esensial dari Pendidikan Pancasila adalah mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan dalam memperoleh, menyaring, dan menerapkan informasi yang relevan dengan konteks

kewarganegaraan. Keberadaan literasi kewarganegaraan (*civic literacy*) menjadi kunci agar peningkatan pemahaman siswa tidak sekadar berorientasi pada kelulusan ujian kognitif atau hafalan tekstual semata, melainkan pada penghayatan makna dari setiap nilai yang diajarkan. Pembelajaran yang efektif seyogianya mampu menjembatani teori hukum dan moral di dalam kelas dengan aplikasi praktis di lapangan, sehingga siswa benar-benar memahami bagaimana mempraktikkan kehidupan yang demokratis (Widiastuti, 2020). Penanaman literasi ini sejak dini akan membentuk keterampilan sosial yang kuat, sehingga anak mampu merespons isu-isu sosial di sekitarnya dengan bijak (Saputra, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memetakan bagaimana kondisi riil komponen literasi ini di lapangan agar arah kebijakan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata anak.

Pada jenjang sekolah dasar, siswa kelas IV menempati fase perkembangan kognitif dan sosial yang sangat strategis, di mana mereka mulai beralih dari pemikiran konkret ke pemikiran yang lebih konseptual. Pada usia ini, anak mulai memperluas interaksi sosialnya di luar lingkaran keluarga dan mulai menghadapi berbagai dinamika pergaulan yang membutuhkan pemahaman tentang norma, aturan, toleransi, serta hak dan kewajiban sesama teman. Jika pondasi literasi kewarganegaraan tidak

dikokohkan pada fase ini, siswa akan kesulitan menyaring pengaruh negatif dari luar dan rentan mengalami krisis moral atau perilaku yang menyimpang dari tata nilai Pancasila. Atas dasar tersebut, pemetaan terhadap kualitas pemahaman moral siswa pada tingkatan kelas ini menjadi parameter yang sangat penting demi keberhasilan pendidikan karakter di jenjang berikutnya.

Namun, kondisi ideal yang diharapkan kurikulum tersebut berbanding terbalik dengan realitas empiris yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan di SDN Rato Lambu, ditemukan gejala bahwa tingkat literasi kewarganegaraan siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila masih berada pada kategori yang memprihatinkan. Kesenjangan ini terlihat dari rendahnya kepekaan sosial anak dalam menanggapi masalah-masalah sederhana di kelas, seperti kurangnya kesadaran bergotong royong, egoisme dalam kelompok, hingga kesulitan membedakan batas antara hak pribadi dan kewajiban bersama. Fenomena ini mengindikasikan adanya hambatan serius dalam proses penyerapan substansi materi kewarganegaraan yang selama ini diajarkan di sekolah.

Rendahnya tingkat literasi kewarganegaraan tersebut diperkuat pula oleh data capaian akademis siswa kelas IV SDN Rato Lambu yang masih jauh di bawah harapan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar siswa secara umum pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila banyak yang belum mampu memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah, yaitu nilai 65. Nilai-nilai siswa cenderung anjlok ketika mereka dihadapkan pada bentuk penilaian yang membutuhkan argumen, penalaran moral, atau pemecahan studi kasus sederhana. Hal ini mencerminkan bahwa penguasaan konsep kewarganegaraan siswa masih bersifat permukaan dan belum meresap ke dalam ranah aplikasi berpikir tingkat tinggi.

Setelah dianalisis lebih mendalam, akar permasalahan utama dari rendahnya mutu literasi dan hasil belajar tersebut diduga kuat bersumber pada proses pembelajaran di kelas yang masih bersifat konvensional. Metode ekspositori atau ceramah satu arah terpantau masih sangat mendominasi aktivitas instruksional yang dilakukan oleh pendidik. Guru memegang kendali penuh sebagai satu-satunya sumber informasi, sementara materi pelajaran disampaikan secara

tekstual mengacu pada buku paket tanpa dikaitkan dengan konteks lingkungan sekitar anak. Pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher-centered) tanpa melibatkan aktivitas penalaran dan fisik siswa secara aktif cenderung menghasilkan pemahaman yang bersifat sementara, abstrak, dan superfisial (Rusman, 2021).

Dampak dari penerapan metode mengajar yang monoton tersebut membuat siswa kelas IV SDN Rato Lambu menjadi pasif, cepat merasa bosan, dan memandang Pendidikan Pancasila sebagai hafalan yang menjemukan. Siswa kehilangan motivasi internal untuk mendalami materi karena mereka kesulitan menangkap relevansi nilai-nilai Pancasila dengan realitas kehidupan nyata mereka sehari-hari. Akibatnya, nilai-nilai kebangsaan hanya dipahami sebatas teori guna menjawab soal ujian, namun gagal menjelma menjadi karakter dan sikap hidup sehari-hari. Kondisi ekosistem kelas yang tidak interaktif ini memperlebar jarak kesenjangan antara kurikulum ideal dengan capaian nyata yang dimiliki oleh siswa.

Untuk melakukan pembenahan yang tepat sasaran dan objektif, guru tidak bisa hanya mengira-ngira solusi pembelajaran atau langsung menerapkan model baru tanpa adanya landasan data diagnostik yang kuat. Diperlukan sebuah kajian ilmiah yang komprehensif melalui studi analisis kebutuhan (need assessment) untuk membedah letak kesenjangan, mengidentifikasi kendala mendasar yang dihadapi siswa, serta memetakan komponen materi atau media apa saja yang mendesak untuk dikembangkan di sekolah tersebut. Dengan diketahuinya peta kebutuhan riil di lapangan, perencanaan strategi pembelajaran Pendidikan Pancasila ke depan akan menjadi lebih efisien dan efektif. Berdasarkan seluruh latar belakang persoalan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam dengan judul "Analisis Kebutuhan Peningkatan Literasi Kewarganegaraan Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di Kelas IV SDN Rato Lambu".

## METODE

Metode pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling krusial dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh informasi yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Mengingat penelitian ini

menggunakan pendekatan analisis kebutuhan (need assessment), maka diperlukan instrumen yang mampu mengeksplorasi kendala proses pembelajaran secara kualitatif sekaligus mengukur kedalaman kemampuan penalaran siswa secara kuantitatif. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data berupa teknik observasi dan tes tertulis berbentuk uraian terbuka. Adapun penjabaran dari masing-masing teknik tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang diselidiki di lapangan (Hadi, 2019). Dalam penelitian analisis kebutuhan ini, observasi digunakan sebagai instrumen kualitatif utama untuk merekam realitas proses pembelajaran Pendidikan Pancasila yang berlangsung di kelas IV SDN Rato Lambu. Melalui observasi langsung, peneliti dapat mengidentifikasi secara objektif pola interaksi guru-siswa, strategi mengajar yang dominan digunakan, ketersediaan media penunjang, serta tingkat partisipasi aktif siswa di dalam kelas. Objek pemantauan dalam observasi ini difokuskan pada dua dimensi esensial yang melatarbelakangi munculnya kesenjangan literasi kewarganegaraan, yaitu:

- Aktivitas Pendidik: Mengamati bagaimana cara guru mengemas esensi materi Pendidikan Pancasila, apakah masih terjebak pada metode konvensional (ceramah tekstual) atau sudah mengarah pada pengondisian masalah sosial yang menuntut pemecahan.
- Aktivitas Peserta Didik: Mengamati indikator awal civic disposition (watak kewarganegaraan) siswa kelas IV, seperti kepekaan sosial, kemampuan berkolaborasi, sikap toleransi, serta keberanian dalam mengutarakan pendapat di muka umum (Creswell, 2018).

Data hasil observasi ini dihimpun menggunakan lembar panduan observasi (check-list dan catatan lapangan) untuk memperoleh bukti empiris mengenai kondisi riil lingkungan belajar di lapangan.

### 2. Tes Tertulis (Uraian Terbuka)

Tes tertulis berbentuk soal uraian (essay) merupakan instrumen evaluasi yang menuntut siswa untuk mengorganisasikan isi pikiran mereka, mengemukakan argumen logis, dan

mengekspresikan gagasan solutif secara mandiri (Sukiman, 2019). Berbeda dengan tes objektif seperti pilihan ganda yang rentan terhadap unsur spekulasi (tebak-tebakan) dan hanya menyentuh tingkat kognitif rendah (hafalan), soal uraian terbuka ini bertindak sebagai alat ukur diagnostik untuk memetakan capaian literasi kewarganegaraan siswa pada ranah berpikir tingkat tinggi (civic knowledge dan penalaran moral). Pada pelaksanaannya, instrumen tes ini disusun dengan mengintegrasikan studi kasus atau dilema moral kontekstual yang akrab dengan dunia anak-anak seusia kelas IV, misalnya tentang penyelesaian perselisihan antar-teman, pelaksanaan hak-kewajiban di sekolah, atau implementasi budaya gotong royong di lingkungan sekitar. Melalui lembar jawaban uraian tersebut, peneliti dapat membedah:

- Kedalaman analisis berpikir kritis siswa dalam mengidentifikasi masalah kemasyarakatan.
- Kemampuan penalaran moral mereka dalam mengaitkan nilai luhur Pancasila dengan solusi riil yang ditawarkan (Widoyoko, 2021).

Data kuantitatif berupa nilai skor esai yang mengacu pada rubrik penilaian analitis, bersama dengan data kualitatif berupa bentuk-bentuk kekeliruan argumen siswa, akan diakumulasikan. Hasil pengolahan data tes tertulis inilah yang menjadi fondasi utama bagi peneliti untuk menyimpulkan seberapa besar tingkat kebutuhan peningkatan literasi kewarganegaraan di kelas IV SDN Rato Lambu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Data hasil penelitian ini diperoleh melalui dua instrumen utama yang dilaksanakan pada Selasa, 24 Februari 2026 di kelas IV SDN Rato Lambu. Fokus utama dari pengumpulan data ini adalah untuk melakukan pemetaan secara objektif dan mendalam mengenai kondisi riil di lapangan terkait dua aspek krusial, yaitu potret proses pembelajaran Pendidikan Pancasila secara kualitatif serta potret tingkat literasi kewarganegaraan siswa secara kuantitatif. Peneliti menerapkan teknik observasi langsung terhadap dinamika kelas untuk merekam jalannya pembelajaran, yang kemudian dikombinasikan dengan pemberian instrumen tes tertulis diagnostik berbentuk uraian terbuka (essay). Melalui perpaduan kedua data ini, aspek kesenjangan antara kurikulum ideal dengan realitas empiris di kelas IV SDN Rato Lambu

dapat diidentifikasi secara menyeluruh sebagai landasan penyusunan dokumen analisis kebutuhan (need assessment).

### 1. Hasil Observasi Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Berdasarkan pengamatan langsung dan pencatatan sistematis menggunakan lembar panduan observasi yang dilakukan di kelas IV SDN Rato Lambu, diperoleh data kualitatif yang komprehensif mengenai jalannya proses belajar-mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Secara umum, potret aktivitas instruksional di dalam kelas menunjukkan bahwa paradigma pembelajaran masih bersifat konvensional dan sepenuhnya berpusat pada pendidik (teacher-centered). Guru memegang kendali mutlak atas seluruh alur penyampaian informasi di dalam kelas dari awal hingga akhir sesi, sementara posisi peserta didik menempati peran sebagai objek penerima informasi yang pasif. Jika dibedah secara lebih mendalam, hasil observasi ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa indikator temuan kritis sebagai berikut:

- Dominasi Metode Ekspositori (Ceramah Satu Arah): Sepanjang jam pelajaran berlangsung, metode ekspositori atau ceramah satu arah bertindak sebagai instrumen tunggal guru dalam mentransfer materi. Guru menyampaikan materi regulasi, norma, serta nilai-nilai Pancasila dengan cara membacakannya di depan kelas, yang sesekali diselingi dengan menuliskan poin-poin definisi di papan tulis. Komunikasi yang terbangun berjalan secara linier dari atas ke bawah (guru ke siswa), tanpa adanya variasi strategi mengajar yang interaktif. Pendidik belum mengintegrasikan pendekatan kontekstual seperti pembelajaran berbasis pemecahan masalah (problem solving) ataupun diskusi interaktif yang mampu menarik atensi psikologis anak usia sekolah dasar.
- Ketergantungan Sumber Belajar pada Buku Teks Secara Tekstual: Proses penyampaian materi terpantau sangat kaku karena bersumber murni dan mutlak pada buku teks paket Pendidikan Pancasila yang tersedia. Guru mengajar dengan pola linier mengikuti urutan halaman buku tanpa melakukan rekonstruksi, modifikasi, atau kontekstualisasi materi ke dalam realitas sosial kemasyarakatan di sekitar lingkungan SDN Rato Lambu. Nilai-nilai dasar Pancasila diajarkan sebatas doktrin hafalan definisi tertulis, bukan sebagai nilai hidup (living values) yang dapat diaplikasikan. Hal ini membuat esensi pembelajaran kehilangan maknanya dan dirasakan sebagai sesuatu yang abstrak oleh siswa.
- Rendahnya Ketergantungan dan Keterlibatan Aktif Siswa: Pola mengajar yang mekanistik tersebut memberikan implikasi langsung terhadap penurunan drastis tingkat keterlibatan aktif, baik secara fisik, mental, maupun emosional siswa. Selama pembelajaran berlangsung, sebagian besar siswa kelas IV terlihat pasif, jenuh, dan kehilangan fokus. Aktivitas dominan yang dilakukan siswa hanyalah mendengarkan penjelasan guru secara formalitas dan sekadar menyalin apa yang tertulis di papan tulis ke dalam buku catatan masing-masing. Peneliti mencatat adanya gejala penurunan motivasi belajar yang dicirikan dengan perilaku sebagian siswa yang mulai menopang dagu, melamun, hingga saling berbisik dengan teman sebangku di luar topik pelajaran.
- Minimnya Ruang Dialektika dan Argumen Kewarganegaraan: Selama proses observasi, peneliti menemukan fakta bahwa siswa hampir tidak pernah diberikan kesempatan atau stimulus untuk melakukan diskusi kelompok, menganalisis fenomena sosial, ataupun mengutarakan argumen kritis terkait implementasi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pertanyaan yang diajarkan guru umumnya hanya menuntut jawaban ingatan pendek (seperti "Apa bunyi sila ketiga?"), bukan pertanyaan produktif yang memantik penalaran kritis. Tidak adanya ruang dialektika ini mematikan potensi siswa untuk belajar mengemukakan pendapat secara demokratis di muka umum.
- Atmosfer Kelas yang Belum Mendukung Penguatan Literasi Kewarganegaraan: Secara keseluruhan, atmosfer dan iklim akademis di kelas IV SDN Rato Lambu belum mendukung pengondisian yang merangsang kepekaan sosial (civic disposition) maupun penalaran kritis siswa (civic knowledge). Kelas dikelola secara kaku untuk ketertiban mendengarkan ceramah, sehingga gagal menciptakan laboratorium sosial mini yang interaktif. Siswa tidak dilatih untuk tanggap terhadap masalah sosial di sekitarnya, seperti isu ketertiban, toleransi terhadap perbedaan ego, atau esensi kerja sama gotong royong. Akibatnya, esensi dari literasi kewarganegaraan tereduksi menjadi sekadar

hafalan materi ujian, bukan pembentukan kesadaran moral warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Observasi Proses Pembelajaran

| No. | Aspek / Indikator Observasi      | Kondisi Riil di Kelas IV SDN Rato Lambu                                                           | Dampak terhadap Siswa                                                                  |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pendekatan dan Model Mengajar    | Didominasi metode ekspositori (ceramah satu arah) oleh guru; bersifat <i>teacher-centered</i> .   | Siswa menjadi pasif dan hanya bertindak sebagai penerima informasi.                    |
| 2   | Pemanfaatan Sumber Belajar       | Terpaku secara kaku pada buku teks paket; materi disampaikan secara tekstual tanpa variasi media. | Pembelajaran dirasa abstrak, menjemukan, dan kehilangan makna kontekstual.             |
| 3   | Partisipasi dan Aktivitas Mental | Aktivitas terbatas pada mendengarkan penjelasan guru dan menyalin tulisan dari papan tulis.       | Munculnya kejenuhan, siswa kehilangan fokus (melamun, menopang dagu, berbisik).        |
| 4   | Ruang Dialektika dan Diskusi     | Minim stimulus pertanyaan pemantik; tidak ada ruang diskusi kelompok untuk mengulas isu sosial.   | Siswa tidak terlatih mengutarakan argumen, gagasan, atau pendapat secara demokratis.   |
| 5   | Iklim Literasi Kewarganegaraan   | Kelas dikelola secara kaku demi ketertiban mendengar; tidak ada pengondisian laboratorium sosial. | Siswa gagal menghayati nilai Pancasila sebagai <i>living values</i> (nilai kehidupan). |

Tabel 2. Rekapitulasi hasil tes tertulis diagnostic

| Parameter Evaluasi             | Nilai/ Capaian Riil | Standar Target (KKM) | Keterangan Standar Kelulusan                  |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Nilai Rata-Rata Kelas          | 54,20               | 65                   | Belum Mencapai Batas KKM                      |
| Jumlah Siswa Tuntas            | 6 Siswa             | -                    | Nilai siswa mencapai atau lebih besar dari 65 |
| Jumlah Siswa Belum Tuntas      | 14 Siswa            | -                    | Nilai siswa berada di bawah 65                |
| Persentase Ketuntasan Klasikal | 30%                 | 85%                  | Sangat Rendah (Kesenjangan Tinggi)            |

Pembahasan

Kesenjangan (gap) yang signifikan antara tuntutan idealitas kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan realitas empiris yang terjadi di kelas IV SDN Rato Lambu. Fenomena rendahnya rata-rata nilai tes tertulis diagnostik siswa yang hanya mencapai 54,20 dengan ketuntasan klasikal sebesar 30% menjadi indikator kuat adanya krisis literasi kewarganegaraan (civic literacy). Sejalan dengan temuan fakta kualitatif di lapangan, kondisi ini bersumber langsung dari pola pengajaran guru yang masih bersifat konvensional, monoton, dan berpusat pada pendidik (teacher-centered). Prasetyo dan Utami (2023) menegaskan bahwa literasi kewarganegaraan pada anak usia sekolah dasar tidak dapat tumbuh subur dalam iklim kelas yang pasif, melainkan membutuhkan stimulus instruksional yang menghadapkan anak pada diskursus sosial. Kegagalan dalam menjembatani muatan nilai Pancasila ke dalam aktivitas berpikir kritis membuat kompetensi kewarganegaraan siswa tereduksi menjadi hafalan mekanistik semata.

Akar utama dari rendahnya pencapaian aspek pengetahuan warga negara (civic knowledge) siswa kelas IV SDN Rato Lambu adalah kuatnya dominasi metode ekspositori atau ceramah satu arah dalam pembelajaran. Metode mengajar konvensional ini menempatkan peserta didik sebatas wadah kosong yang menerima transfer informasi materi secara searah tanpa adanya pengondisian aktivitas kognitif tingkat tinggi. Menurut teori yang dikemukakan oleh Ramadhan dkk. (2024), metode ceramah yang kaku dan abstrak pada jenjang sekolah dasar cenderung mematikan rasa ingin tahu alami anak serta menghasilkan struktur pemahaman yang bersifat superfisial dan mudah terlupakan. Ketika siswa dipaksa menerima doktrinasi materi secara linier, kemampuan penalaran moral mereka menjadi tumpul karena otak tidak dibiasakan untuk menganalisis, mengevaluasi, ataupun mengonstruksi argumen mandiri (Suryani & Wijaya, 2022). Akibatnya, esensi dari Pendidikan Pancasila sebagai kompas moral gagal diinternalisasi secara mendalam ke dalam skema berpikir siswa.

Faktor penyebab lain yang memperparah rendahnya literasi kewarganegaraan ini adalah tingginya ketergantungan guru pada pemanfaatan sumber belajar secara tekstual murni melalui buku paket. Penyampaian materi norma, hak, dan kewajiban secara harfiah tanpa adanya upaya kontekstualisasi membuat pelajaran Pendidikan Pancasila dirasa asing dan menjemukan bagi anak usia kelas IV. Pentingnya penyesuaian materi ke dalam ekosistem terdekat anak didukung oleh penelitian Lestari dan Arifin (2025) yang menyatakan bahwa materi kewarganegaraan harus ditransformasikan dari sekadar teks teoretis menjadi nilai hidup (*living values*) melalui penggabungan isu-isu lokal kemasyarakatan. Ketika guru mengabaikan realitas sosial dan budaya di sekeliling lingkungan SDN Rato Lambu, siswa kehilangan jembatan logis untuk mengaitkan teori di sekolah dengan aplikasi perilaku sehari-hari (Handayani, 2021). Pola pengajaran yang lepas dari konteks riil inilah yang membuat anak tidak mampu memaknai esensi nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.

Kondisi pembelajaran yang mekanistik tersebut memberikan dampak psikologis dan sosiologis berupa matinya ruang dialektika dan keterlibatan aktif peserta didik di dalam kelas. Berdasarkan rekapitulasi observasi, siswa terlihat jenuh, pasif, dan sekadar sibuk menyalin tulisan dari papan tulis sebagai formalitas belajar. Krisis partisipasi ini dinilai sangat berbahaya bagi pembentukan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) anak. Fauzi dkk. (2026) berpendapat bahwa ruang kelas Pendidikan Pancasila seyogianya berfungsi sebagai laboratorium sosial mini di mana siswa dilatih untuk berani berpendapat, menyaring informasi, bernegosiasi sehat, serta mengembangkan toleransi emosional terhadap perbedaan sudut pandang. Tanpa adanya pembiasaan aktivitas demokratis melalui kerja kelompok kolaboratif atau forum diskusi, siswa tidak akan pernah menguasai keterampilan hidup bermasyarakat yang adil dan beradab sesuai prinsip dasar kebangsaan (Saputra, 2021).

Dampak dari tidak adanya ruang dialektika tersebut terefleksi nyata pada hasil tes tertulis diagnostik berbentuk esai terbuka, di mana 70% siswa mengalami ketidaktuntasan dengan jawaban yang sangat pendek dan dangkal. Tes tertulis berbentuk uraian studi kasus dilema moral sebenarnya menuntut kompetensi kognitif tingkat tinggi yang melibatkan analisis logis-rasional dari sudut pandang siswa sendiri. Hidayah dan

Nugroho (2023) memaparkan bahwa tes esai mampu mendeteksi secara presisi tingkat kematangan penalaran moral seseorang karena meniadakan unsur spekulasi tebak-tebakan seperti pada tes pilihan ganda. Ketidakmampuan mayoritas siswa kelas IV SDN Rato Lambu dalam memberikan solusi rasional atas kasus pelanggaran hak-kewajiban membuktikan adanya kesenjangan kompetensi pemecahan masalah (*problem-solving*). Kekeliruan argumentasi siswa dalam lembar jawab esai menunjukkan bahwa mereka belum terlatih menyikapi benturan sosial secara bijak dan sistematis (Widoyoko, 2021).

Sebagai akhir dari proses *need assessment* (analisis kebutuhan), seluruh rentetan temuan empiris ini mengerucut pada kesimpulan perlunya rekomendasi intervensi instruksional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Hasil analisis menegaskan bahwa kelas IV SDN Rato Lambu membutuhkan tiga poin perbaikan mendesak: reorientasi model pembelajaran ke arah pendekatan interaktif yang berbasis pada keaktifan siswa (*active learning*), pengembangan bahan ajar atau media digital yang berbasis pada isu kontekstual, serta pembukaan ruang diskusi kelompok yang demokratis. Sejalan dengan rekomendasi dari Widiastuti (2022), rekonstruksi strategi mengajar dari informatif menjadi transformatif-partisipatif adalah langkah mutlak untuk menyelamatkan kualitas literasi kebangsaan. Dengan terpenuhinya poin-poin kebutuhan esensial tersebut, proses pembelajaran Pendidikan Pancasila ke depan diharapkan dapat berjalan efektif dalam mendongkrak capaian akademis kognitif sekaligus membangun profil warga negara muda yang kritis, responsif, dan bertanggung jawab.

## KESIMPULAN

Analisis kebutuhan di kelas IV SDN Rato Lambu mengungkap adanya krisis literasi kewarganegaraan siswa, ditunjukkan oleh rata-rata nilai diagnostik yang rendah (54,20) dan ketuntasan klasikal yang hanya mencapai 30%. Hal ini berakar dari proses pembelajaran Pendidikan Pancasila yang kaku, tekstual, dan berpusat pada guru. Sebagai solusi, diperlukan intervensi instruksional mendesak berupa penerapan model pembelajaran aktif, pemanfaatan media kontekstual, serta pembukaan ruang diskusi yang demokratis bagi siswa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam proses penelitian dan penyusunan artikel ini

## REFERENSI

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, A., Supriatna, N., & Wahyudi, G. (2026). Rekonstruksi iklim kelas Pendidikan Pancasila sebagai laboratorium sosial di sekolah dasar. *Jurnal Teori dan Landasan Pendidikan*, 11(1), 45–58.
- Hadi, S. (2019). *Metodologi penelitian* (Vol. 1). Pustaka Pelajar.
- Handayani, S. (2021). Kontekstualisasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 7(2), 112–123.
- Hidayah, N., & Nugroho, A. (2023). Analisis tes diagnostik uraian terbuka untuk mengukur kedalaman penalaran moral siswa sekolah dasar. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 14(1), 89–101.
- Lestari, P., & Arifin, Z. (2025). Mengembangkan living values melalui bahan ajar Pendidikan Pancasila berbasis isu-isu kontekstual kemasyarakatan. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Dasar*, 9(3), 201–214.
- Nugroho, B. (2021). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter warga negara muda di jenjang sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(2), 145–156.
- Prasetyo, A., & Utami, R. D. (2023). Urgensi stimulus instruksional dalam menumbuhkan literasi kewarganegaraan anak usia sekolah dasar. *Jurnal Civic Education*, 7(2), 76–88.
- Pratama, R. A., & Setiawan, D. (2022). Peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk civic knowledge siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 8(1), 32–44.
- Putri, M. E., & Wahyudi, A. (2023). Penguatan kompetensi moral sejak usia dini sebagai fondasi integrasi generasi penerus bangsa. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Sekolah Dasar*, 4(2), 118–130.
- Ramadhan, F., Kurniawan, H., & Saputra, M. (2024). Dampak metode ekspositori terhadap retensi ingatan dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sosial di sekolah dasar. *Jurnal Pedagogi Kebangsaan*, 10(1), 15–29.
- Rusman. (2021). *Model-model pembelajaran: Mengembangkan profesionalisme guru* (Edisi Ke-3). Rajawali Pers.
- Saputra, H. (2021). Pembelajaran berbasis keterampilan demokratis untuk menguatkan civic disposition siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 54–66.
- Sukiman. (2019). Pengembangan sistem evaluasi pembelajaran. Remaja Rosdakarya.
- Suryani, L., & Wijaya, C. (2022). Tumpuhnya penalaran moral akibat doktrinasi tekstual dalam pembelajaran rumpun sosial. *Jurnal Akal Kritis dan Pedagogi Dasar*, 5(3), 190–202.
- Widiastuti, T. (2020). Menjembatani teori hukum dan moral melalui praktik simulasi demokrasi di sekolah dasar. *Jurnal Elemen Edukasi*, 8(2), 99–111.
- Widiastuti, T. (2022). Rekonstruksi strategi mengajar dari informatif menjadi transformatif-partisipatif pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. *Jurnal Inovasi Kurikulum*, 19(4), 310–324.
- Widoyoko, S. E. P. (2021). *Penilaian hasil belajar di sekolah*. Pustaka Pelajar.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskriptif kualitatif dalam komunikasi. *Jurnal Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.